



Peran Serta Warga Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Ahmad Syahril Alfani³,
Muhamad Jalaludin⁴, Solahuddin Dueramae⁵

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Pascasarjana Universitas, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com ashfiy.anura@gmail.com syahrilfani4@gmail.com
muhamadjalaludin684@gmail.com huddin2549@gmail.com

Abstrak. *This journal defines public policy as actions taken by governmental authorities to address specific social issues and emphasizes citizen participation as a key element in the democratic process. It outlines the importance of community involvement in policymaking to enhance legitimacy, governmental accountability, and the quality of policies. Factors influencing citizen participation include education, socioeconomic status, and access to information. The theoretical framework underscores the significance of active participation for successful community development, particularly highlighting the role of Generation Z in political engagement through digital platforms. Various methods for involving citizens in decision-making—such as public forums, surveys, and online platforms—are discussed, alongside the benefits of integrating technology to promote transparency and inclusivity. To explore this phenomenon in depth, a qualitative research method with an exploratory case study approach is employed. The study involves in-depth interviews with key informants such as public officials, representatives of civil society organizations, and Generation Z citizens who are actively engaged in digital participation. Additionally, participatory observation of public policy forums and documentation of various technology-based participatory initiatives are conducted. Thematic analysis is used to identify patterns, themes, and factors that influence the effectiveness of citizen participation in policymaking. Data validity is ensured through source and method triangulation, as well as member checking with selected respondents. This paper also presents case studies of successful participatory initiatives while addressing challenges such as unequal power dynamics and limited access to information. The recommendations focus on strategies to raise awareness, enhance transparency, encourage inclusivity, and foster a culture of active participation to ensure that policies reflect the diverse needs of society. Overall, meaningful citizen engagement is deemed essential for effective governance and policymaking.*

Keywords: *Public Policy .Citizen Participation. Democratic Governance*

Abstrak . Jurnal ini mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial tertentu dan menekankan partisipasi warga negara sebagai elemen kunci dalam proses demokrasi. Teks ini menguraikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas pemerintah, dan kualitas kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga negara termasuk pendidikan, status sosial ekonomi, dan akses terhadap informasi. Kerangka kerja teoretis menekankan pentingnya partisipasi aktif untuk keberhasilan pembangunan masyarakat, terutama menyoroti peran Generasi Z dalam keterlibatan politik melalui platform digital. Berbagai metode untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui forum publik, survei, dan platform daring dibahas, di samping manfaat integrasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas. Untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti pejabat publik, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan warga Generasi Z yang aktif terlibat dalam partisipasi digital. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap forum-forum kebijakan publik dan dokumentasi atas berbagai inisiatif partisipatif berbasis teknologi. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang oleh responden terpilih. Naskah ini juga menyajikan studi kasus tentang inisiatif partisipatif yang berhasil sambil mengatasi tantangan seperti dinamika kekuasaan yang tidak setara dan akses informasi yang terbatas. Rekomendasi berfokus pada strategi untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan transparansi, mendorong inklusivitas, dan menumbuhkan budaya partisipasi aktif untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat yang bermakna sangat penting untuk tata kelola dan pembuatan kebijakan yang efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Partisipasi Warga Negara, Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

I. PENDAHULUAN

Definisi kebijakan publik

"Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik biasanya terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak." (Teori, 2009) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah elemen kunci dalam konteks demokratisasi yang memungkinkan warga negara untuk berkontribusi, memberikan masukan, dan memengaruhi pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memperkaya kualitas kebijakan publik telah dijelaskan dalam penelitian ."(Sitorus, 2023)(Iskandar, 2017)

Keterlibatan warga dalam keputusan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang pekerjaan dan pendidikan masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri melibatkan peran masyarakat melalui berbagai forum seperti rembug warga, pertemuan, musyawarah mufakat, dan musrembang . Generasi Z juga memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan keterlibatan politik yang lebih aktif dan perjuangan untuk perubahan sosial dan politik. Mereka cenderung mendapatkan informasi politik melalui media sosial, podcast, video, dan literatur digital, yang dapat mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam keputusan kebijakan."(Aulia & Tri, 2016)(Wahib, 2024)

2. KERANGKA TEORITIS

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan Desa Wisata Kandri sangat penting untuk keberhasilannya. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan melalui forum komunitas seperti rembug warga, pertemuan, pembangunan konsensus, dan musrembang sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan komunitas diperhatikan. Selain itu, peran aktif Generasi Z dalam pembuatan kebijakan publik, dengan peningkatan keterlibatan politik dan advokasi mereka untuk perubahan sosial dan politik,

menyoroti pentingnya perspektif mereka dalam proses pengambilan keputusan. Karena generasi ini cenderung mengandalkan media sosial, podcast, video, dan literatur digital untuk informasi politik, penting untuk mengenali bagaimana media-media ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan.

3. METODE KETERLIBATAN WARGA

Ada berbagai metode keterlibatan warga yang dapat digunakan untuk melibatkan anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan umum adalah melalui forum publik dan pertemuan balai kota, di mana warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka langsung kepada para pengambil keputusan. (Totok et al., 2024) .Metode lain adalah melalui survei dan formulir umpan balik, yang memungkinkan pengumpulan masukan dari komunitas secara lebih terstruktur dan luas. Selain itu, beberapa organisasi mungkin menggunakan kelompok fokus atau komite penasihat untuk mengumpulkan perspektif yang lebih mendalam dari segmen-segmen tertentu dalam populasi. Dengan menggunakan kombinasi metode-metode ini, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa berbagai suara yang beragam didengar dan dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Dalam proses pengambilan keputusan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pengembangan pendekatan baru. Salah satu metode inovatif yang telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan platform online dan media sosial untuk berinteraksi dengan publik dan mengumpulkan umpan balik tentang kebijakan yang diusulkan. akses bagi warga untuk berbagi pemikiran dan kekhawatiran mereka dengan pengambil keputusan secara real-time, sehingga memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Selain itu, platform online dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih beragam, memungkinkan sampel opini publik yang lebih inklusif dan representatif untuk dipertimbangkan saat membuat keputusan kebijakan penting.

kebijakan Dengan memanfaatkan teknologi untuk melibatkan warga, pemerintah dapat memastikan bahwa beragam suara didengar dan diperhitungkan saat merumuskan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.(Damanik, 2023) Alat digital ini juga memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, karena semua umpan balik dan diskusi dapat didokumentasikan dan dibagikan secara publik. Ini tidak hanya

membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya tetapi juga mendorong rasa kepemilikan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, teknologi dapat membantu memperlancar proses pengumpulan dan analisis umpan balik, memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi dan berbasis bukti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi publik.

Cara untuk melibatkan warga dalam proses kebijakan publik

Dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang beragam, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang isu-isu kebijakan yang ada, dan secara aktif mencari masukan dari komunitas yang kurang terwakili. Dengan menggabungkan praktik terbaik ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya didasarkan pada informasi yang baik dan efektif tetapi juga mencerminkan berbagai perspektif dan kebutuhan komunitas yang mereka layani.

Saran untuk Meningkatkan Partisipasi Warga

Dengan mengadakan pertemuan balai kota, membuat platform online untuk umpan balik dan diskusi, serta mengembangkan program penjangkauan komunitas. Dengan menyediakan berbagai saluran bagi warga untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dapat memberdayakan individu untuk memiliki suara dalam keputusan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi seputar proposal kebijakan akan membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. akhirnya, mendorong budaya partisipasi aktif warga akan menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan adil.

Juga termasuk melaksanakan inisiatif data terbuka, menciptakan peluang untuk konsultasi publik dan umpan balik, menetapkan saluran komunikasi yang jelas antara pejabat pemerintah dan konstituen, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan inklusif dan mewakili berbagai perspektif (Ayuni, 2024). Dengan memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi tindakan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas yang mereka layani. Ini tidak hanya menghasilkan hasil yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat tetapi juga membantu menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

Kebijakan untuk mempromosikan inklusivitas dan keberagaman dalam inisiatif keterlibatan warga untuk mengambil berbagai bentuk, seperti mengadakan forum publik dan pertemuan balai kota untuk mengumpulkan masukan dari berbagai suara. Selain itu,

memanfaatkan platform online dan media sosial dapat membantu menjangkau audiens yang lebih besar dan memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. (Oxy et al., 2023) .Dengan secara aktif mencari dan menggabungkan berbagai perspektif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan mereka benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan di antara konstituen tetapi juga mendorong budaya kolaborasi dan saling menghormati.

4. PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat. Biasanya, kebijakan publik terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak (Fung, 2006).Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan elemen kunci dalam demokrasi, karena memungkinkan warga negara memberikan masukan, berkontribusi, serta memengaruhi arah kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka (Michels & De Graaf, 2010). Keterlibatan ini memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkaya kualitas perumusan kebijakan itu sendiri (OECD, 2020).Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap informasi (Nabatchi & Leighninger, 2015). Di era digital, Generasi Z memainkan peran kunci dalam dinamika ini. Mereka memperoleh informasi politik melalui media sosial, podcast, dan literatur digital, yang membentuk cara mereka berpartisipasi (Loader, Vromen, & Xenos, 2014). Konsep pemerintahan partisipatif, di mana warga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, kini menjadi semakin penting. Penggunaan platform digital telah membuka peluang baru dalam keterlibatan publik yang lebih luas dan inklusif (Boulianne, 2015). Ketika Generasi Z secara aktif diikutsertakan dalam diskusi kebijakan, hal ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas serta memperkuat transparansi (Zhang & Chia, 2022).Model partisipasi warga dalam kebijakan publik menggarisbawahi pentingnya partisipasi kaum muda dalam proses yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Dengan melibatkan mereka, kebijakan menjadi lebih adaptif, inovatif, dan representatif (Jenkins, Ito, & boyd, 2015).Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan keberhasilan pendekatan ini. Contohnya, inisiatif anggaran partisipatif di Porto Alegre, Brasil,

memberikan warga wewenang langsung untuk menentukan alokasi dana kota (Smith, 2009). Reformasi zonasi yang dipimpin oleh komunitas di Portland, Oregon, juga menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membentuk perkembangan wilayahnya secara aktif (UN, 2021).

Namun demikian, tantangan tetap ada. Dinamika kekuasaan yang timpang, rendahnya akses informasi, dan keterbatasan saluran partisipasi menjadi kendala utama dalam proses demokratis ini (Nabatchi & Leighninger, 2015). Oleh karena itu, diperlukan strategi sistematis untuk meningkatkan keterlibatan, memperluas akses, serta menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui platform daring, diskusi kebijakan bisa menjangkau lebih banyak warga, memungkinkan mereka memberikan umpan balik secara real-time, dan meningkatkan keterwakilan suara publik (OECD, 2020).

Dengan pendekatan ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi produk birokrasi, tetapi juga hasil kolaborasi yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat (Fung, 2006). Pada akhirnya, membangun budaya partisipatif yang berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang untuk demokrasi yang sehat dan tata kelola yang responsive.

Di mana individu terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, menjadi semakin penting di era digital ini. Dengan melibatkan Generasi Z secara aktif dalam diskusi kebijakan dan memungkinkan mereka untuk menyumbangkan perspektif unik mereka, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan mereka lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas beragam dari populasi. Ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya menghasilkan hasil kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Model partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik

"Pentingnya melibatkan warga, terutama kaum muda, dalam membentuk kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka adalah kunci untuk memastikan keterwakilan yang lebih baik, solusi inovatif, dan masa depan yang lebih cerah. Generasi Z memiliki pengalaman unik dan perspektif yang memengaruhi pandangan mereka terhadap politik dan peran mereka dalam sistem sosial, sehingga melibatkan mereka dalam proses kebijakan sangat penting."(Ratama Inka Nusamuda Ayatullah Hadi and Rizal Umami, 2024)(Amir & Dian, 2023)(Rifqi et al., 2024)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga dalam keputusan kebijakan termasuk tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, akses informasi, kepercayaan pada

pemerintah, dan persepsi efektivitas masukan individu. Selain itu, keberadaan jaringan komunitas yang kuat dan peluang untuk keterlibatan yang bermakna juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor ini, pembuat kebijakan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan efektif yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua anggota masyarakat.

Studi Kasus

Untuk menggambarkan dampak faktor-faktor ini terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan, sangat berguna untuk meneliti beberapa studi kasus. Contoh-contoh dunia nyata ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana berbagai komunitas dan individu menavigasi kompleksitas pembuatan kebijakan dan berbagai hambatan yang mungkin mereka hadapi. Dengan menganalisis studi kasus ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada dalam mempromosikan keputusan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Termasuk inisiatif anggaran partisipatif di Porto Alegre, Brasil, di mana penduduk memiliki suara langsung dalam pengalokasian dana kota. Contoh lainnya adalah reformasi zonasi yang dipimpin oleh komunitas di Portland, Oregon, yang memungkinkan partisipasi lebih besar dari penduduk dalam membentuk perkembangan lingkungan mereka. (Siahay, n.d.). Studi kasus ini menunjukkan kekuatan keterlibatan warga dalam membentuk keputusan kebijakan dan menyoroti pentingnya menciptakan peluang bagi suara yang beragam untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan. Adapun hambatan seperti kurangnya akses informasi, peluang terbatas untuk keterlibatan yang bermakna, dan dinamika kekuasaan yang tidak setara yang dapat meminggirkan kelompok tertentu. Selain itu, mungkin ada perlawanan dari pejabat pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya yang tidak terbiasa berbagi wewenang pengambilan keputusan dengan publik. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya proaktif untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang inklusif untuk dialog dan kolaborasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, komunitas dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan prioritas mereka tercermin dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dampak keterlibatan warga terhadap hasil kebijakan

Selain itu, keterlibatan warga juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan efektif dengan membawa berbagai perspektif ke meja perundingan. (Winarno, n.d.) Ketika anggota komunitas terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan wawasan

dan keahlian berharga yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya. Ini dapat membantu mengidentifikasi dan menangani masalah yang paling penting bagi mereka yang langsung terkena dampak oleh kebijakan yang sedang dikembangkan. Sebaliknya, hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih responsif dan inklusif yang lebih memenuhi kebutuhan semua anggota komunitas. Pada akhirnya, keterlibatan warga negara dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berniat baik tetapi juga didasarkan pada informasi yang baik dan dilaksanakan secara efektif.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, berinteraksi dengan komunitas secara bermakna dan inklusif sangat penting untuk pemerintahan dan pembuatan kebijakan yang efektif. Dengan mendengarkan secara aktif dan melibatkan berbagai suara yang beragam, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Ke depan, sangat penting bagi pemerintah untuk terus memprioritaskan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, & Dian. (2023). *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Aulia, & Tri. (2016). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1).
- Ayuni. (2024). *Tata kelola humas dan keprotokolan*. <https://eprints.uniska>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538.
- Damanik. (2023). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75.
- Iskandar. (2017). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1).
- Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2015). *Participatory culture in a networked era: A conversation on youth, learning, commerce, and politics*. Polity.

- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150.
- Michels, A., & De Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477–491.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public participation for 21st century democracy*. Jossey-Bass.
- OECD. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*. OECD Publishing.
- Oxy, Alit, & Nur. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan pada kegiatan bisnis di era globalisasi.
- ratama, Inka Nusamuda Ayatullah Hadi, & Rizal, Umami. (2024). Rifqi, Eka, Ibrahim, & M. (2024). *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Siahay. (n.d.). *Pengantar perencanaan kota*. Tohar Media.
- Sitorus. (2023). *Literacy Notes*, 1(1).
- Smith, G. (2009). *Democratic innovations: Designing institutions for citizen participation*. Cambridge University Press.
- Teori. (2009). *Kebijakan publik*.
- Totok, Ahmad, & Ilmi. (2024). *Governance digital berbasis riset*.
- United Nations. (2021). *Our common agenda: Report of the Secretary-General*.
- Wahib. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Winarno. (n.d.). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Zhang, W., & Chia, S. C. (2022). Youth and political participation in the digital era: A cross-national study. *Information, Communication & Society*, 25(3), 345–363.